



RENCANA KINERJA TAHUNAN **RKT**

TAHUN 2023
**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG**



<http://dinsos.bulelengkab.go.id>



dinsos@bulelengkab.go.id



(0362) 21248

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunianya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini, diharapkan dapat menjadi bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 3 Januari 2022

Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Buleleng,



Uwu Kariaman Putra, S.Sos, MM.

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2
1.3 Tujuan Rencana Kinerja Tahunan	4
BAB II Rencana Kinerja Tahunan	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	4
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	5
2.3 Indikator dan Target Kinerja	7
2.4 Formulasi/Cara Perhitungan Indikator Kinerja	8
BAB III PENUTUP	14
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	6
Tabel 2.4.1 Formulasi/Cara Perhitungan Indikator Kinerja	9



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, RKPD dijabarkan lagi dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disusun dengan mencermati perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada RKPD Tahun 2023 yang disajikan dalam rencana program sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator sasaran, urusan, anggaran dan SKPD penanggungjawab.

Rencana kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 2023-2026 dan menjadi momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam penanganan masalah sosial baik dalam pemberdayaan, perlindungan maupun bantuan sosial yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan



kesejahteraan masyarakat bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini, diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai sehingga terwujudnya "**Good Governance**".

1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Substansi Perencanaan;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 1. Substansi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Substansi Rehabilitasi Tuna Sosial;
- e. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi:
 1. Substansi Perlindungan Sosial Pasca Bencana;
 2. Substansi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
 3. Substansi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi:



1. Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
 2. Substansi Penanganan Fakir Miskin; dan
 3. Substansi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rencana Kinerja Tahunan adalah:

- a. Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d. Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial kabupaten Buleleng. Yang didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan Tupoksi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2023-2026.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu 2023-2026 sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah “Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial”, dengan indikator tujuan “Persentase penduduk miskin”.

b. Sasaran

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah

1. Sasaran: Menurunnya penduduk miskin
Indikator : Persentase penduduk miskin
2. Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS
Indikator: Persentase penanganan PMKS

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui strategi. Untuk mendukung strategi jangka menengah dinas, maka diambil kebijakan yang merupakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.



Tabel 2.2.1
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL (2021)	TARGET				KONDISI AKHIR (2026)	STRATEGI	ARAH KEBIKAJAN	PENJELASAN			
					2023	2024	2025	2026				ACUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin	1 Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	6,12	5,15	4,9	4,8	4,6	4,6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	1 Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial	Data BPS	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Sosial Kab.Buleleng
		Meningkatnya Penanganan PMKS	2	Persentase penanganan PMKS	3,86	6,86	9,86	12,86	15,86	15,86	Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS	Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 *)	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	Dinas Sosial Kab.Buleleng

2.3 Indikator dan Target Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu. RKT 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKT Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagaimana terlampir.

2.4 Formulasi/Cara Perhitungan Indikator Kinerja

Untuk memudahkan dalam perhitungan pencapaian indikator kinerja bisa digunakan formulasi sesuai dengan tabel berikut ini.

Tabel 2.4.1
Formulasi/Cara Perhitungan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN / KINERJA / TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN
1	Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	Persentase penduduk miskin di dapat dari BPS
1.1	Meningkatnya pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif}}{\text{Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)}} \times 100$
		2 Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif
1.2	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN / KINERJA / TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN
		2 Jumlah laporan Perlindungan dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	Laporan Perlindungan dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku
2	Meningkatnya penanganan PMKS	1 Persentase penanganan PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$
		2 Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku
		3 Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN / KINERJA / TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN
2.1	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah Rehabilitasi Sosial PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$
		2 Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	Laporan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana selama masa tanggap darurat}} \times 100$
3.1	Terwujudnya penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	1 Persentase penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100$

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN / KINERJA / TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN
		Jumlah laporan penanganan 2 bencana yang di tindak lanjut	Laporan penanganan bencana yang di tindak lanjut
4	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	$\frac{\text{Jumlah perlindungan terhadap nilai kepahlawanan}}{\text{Jumlah perlindungan nilai kepahlawanan yang seharusnya dilaksanakan}} \times 100$
4.1	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan dan hari-hari besar	1 Persentase nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	$\frac{\text{Jumlah perlindungan terhadap nilai kepahlawanan}}{\text{Jumlah perlindungan nilai kepahlawanan yang seharusnya dilaksanakan}}$
		2 Jumlah laporan penanaman nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	Laporan penanaman nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	Persentase capaian IKM Dinas Sosial	Persentase capaian IKM di dapatkan dari laporan SKM Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN / KINERJA / TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN
5.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	1 Nilai AKIP yang baik	Nilai AKIP
		2 Jumlah penyebaran kuesioner pengguna layanan	Laporan penyebaran kuesioner pengguna layanan
		3 Jumlah layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan
		4 Jumlah layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan
		5 Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan

BAB III

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi / kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2023 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi / kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

SINGARAJA

Jl. Veteran No. 7 Telepon/Fax.(0362) 21248

Web: <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

Email: dinsos@bulelengkab.go.id

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : I PUTU KARIAMAN PUTRA, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Berjanji akan mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 sesuai lampiran rencana kinerja tahunan ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Dan selanjutnya akan selalu melaksanakan supervisi yang diperlukan kepada seluruh staf serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana kinerja tahunan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperkukan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.

Singaraja, 3 Januari 2022

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19691231 199103 1 053

**LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023**

Sasaran / Capaian Program		Target / Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan		
Uraian	Indikator Kinerja			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output				
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9		
1	Menurunnya penduduk miskin	1	Persentase penduduk miskin	5,15%	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	2.870.740.667	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	335.134.747	
									Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	190.580.000	
									Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	
									Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2.095.025.920	
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	557.139.930	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	300.000.000	
									Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	257.139.930	
2	Meningkatnya penanganan PMKS	1	Persentase penanganan PMKS	6,86%	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	1.108.756.193	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000	
									Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantudan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	167.518.709	
									Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	

Sasaran / Capaian Program		Target / Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan		
Uraian	Indikator Kinerja			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output				
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9		
								Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	173.237.484		
								Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	318.000.000		
				Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	652.658.247	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	50.000.000			
							Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000			
							Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	502.658.247			
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	Program Penanganan Bencana	Terwujudnya penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	345.894.243	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	345.894.243	
						Terwujudnya penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	150.000.000	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	
4	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	1	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	100%	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan dan hari-hari besar	Persentase nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	1.642.480.861	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	654.499.183	
							Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	937.981.678			
							Terlaksananya Penanganan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	50.000.000			

Sasaran / Capaian Program		Target / Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan		
Uraian	Indikator Kinerja			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output				
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9		
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	1	Persentase capaian IKM Dinas Sosial	80%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Nilai AKIP yang baik, Jumlah penyebaran kuesioner pengguna layanan	350.991.178	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	
								Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.991.178		
								Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.581.882.500		
								Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	453.784.406		
								Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	284.839.324		
								Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15.000.000		
								Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000		
								Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.000.000		
								Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	139.500.000		
								Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	139.161.880		
								Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29.051.780		
								Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.672.200		
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	96.844.514		
								Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	308.101.300		
								Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	290.160.000		
								Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	346.906.246		

Sasaran / Capaian Program		Target / Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	1.280.200.538	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65.336.538	
							Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64.864.000	
							Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.150.000.000	
Total						15.836.766.007			15.836.766.007	

